

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sudan Selatan secara resmi adalah negara paling lemah di dunia menurut *Fragile States Index* 2014.<sup>1</sup> Sebagai negara yang baru, Sudan Selatan harus dihadapkan dengan permasalahan konflik sipil yang berlangsung sejak tahun 2013 kecewa terhadap pemerintahan Sudan Selatan. *Sudan People's Liberation Movement* ini mengakibatkan terpisahnya SPLM menjadi dua bagian yaitu SPLM yang berpihak pada pemerintah Sudan Selatan dan SPLM-OI *Sudan People's Liberation Movement In Opposition* yang berpihak pada Riek Machar sebagai pemimpin dari pasukan pemberontak.<sup>2</sup> Kemunculan pasukan pemberontak disebabkan oleh kekecewaan dari suku Nuer yang diperlakukan tidak adil dalam pemerintahan, adanya impunitas pemerintah Sudan Selatan terhadap beberapa pejabat, tuduh menuduh korupsi serta kondisi ekonomi Sudan Selatan pasca kemerdekaan yang belum membaik menjadi pemicu adanya aksi pemberontakan yang dilakukan oleh SPLM-OI.<sup>3</sup>

Konflik sipil ini telah merugikan negara Sudan Selatan baik dari sisi keamanan regional, ekonomi, dan sosial penduduk Sudan Selatan. Dari sisi keamanan, konflik ini telah membuat negara-negara yang tergabung dalam Uni-Afrika merasa terancam akan adanya perluasan konflik sipil ini. Adanya penduduk Sudan Selatan yang mencari suaka di negara-negara tetangga juga menjadikan konflik sipil ini dapat mengganggu keamanan regional.

<sup>1</sup> The Fund for Peace, "Fragile State Index 2014," The Fund for Peace, <http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1423-fragilestatesindex2014-06d> (Diakses pada 12 Desember 2018)

<sup>2</sup> John Young, "Sudan People's Liberation Army," Institute for security studies, (April 2007), 1-3.

<sup>3</sup> John Young, 5

Dari sisi sosial penduduk, konflik ini telah membuat 700.000 penduduk tewas, lebih dari 1.500.000, penduduk mengungsi dan 2.000.000 penduduk mengalami kelaparan.<sup>4</sup> Dari sisi ekonomi, konflik sipil ini telah membuat inflasi bagi negara Sudan Selatan dimana 98% pendapatan negara Sudan selatan berasal dari ladang minyak milik pemerintah Sudan Selatan.<sup>5</sup>

Konflik ini telah menghambat produksi, terutama produksi penjualan minyak di Sudan Selatan. Negara-negara investor pada perusahaan minyak milik pemerintah Sudan Selatan seperti negara Tiongkok mengalami kerugian yang besar. Walaupun Sudan Selatan hanya menyumbang 2-5% dari impor minyak tahunan Tiongkok namun hal ini juga membawa kerugian bagian Tiongkok dimana saat ini keamanan energi menjadi fokus utama Tiongkok.<sup>6</sup>

Selain minyak yang menjadi prioritas Tiongkok di Sudan Selatan, Tiongkok juga memiliki investasi lainya seperti 100 perusahaan Tiongkok telah ada di Sudan Selatan sejak tahun 2013. Perdagangan kedua negara juga telah mencapai \$ 534 juta pada tahun 2013.<sup>7</sup> Tiongkok melihat Sudan Selatan sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi, tidak hanya kaya terhadap sumber daya alam namun minimnya pesaing, biaya operasi yang murah serta tenaga kerja yang

---

<sup>4</sup> USAID. "South Sudan-Crisis" fact sheet, 4 (February 9, 2018), 1-6

<sup>5</sup> Lauren, Ploch Blanchard. "Conflict in South Sudan and the Challenge Ahead", Congressional Research Service report ( September 22, 2016),16

<sup>6</sup> International Crisis Group, "China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

<sup>7</sup> International Crisis Group, "China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

mudah membuat Tiongkok mendapatkan margin keuntungan 50 persen sebelum konflik sipil pecah pada tahun 2013.<sup>8</sup>

Konflik Sipil di Sudan Selatan telah menarik perhatian Tiongkok untuk berperan aktif dan menjadi aktor sentral dalam upaya perdamaian. Keikutsertaan Tiongkok pada konflik sipil ini merupakan sebuah transformasi kebijakan luar negeri Tiongkok yang sebelumnya sangat kaku. Transformasi kebijakan luar negeri yang proaktif dalam proses perdamaian ini telah dimulai sejak konflik sipil di Sudan dan berlanjut ke beberapa negara di kawasan Afrika Sub-Sahara. Hal ini telah menjadi studi kasus yang penting dalam evolusi kebijakan luar negeri Tiongkok secara global.

Pandangan mengenai peran besar Tiongkok di Sudan Selatan telah ada sebelum konflik sipil meletus pada tahun 2013. Salah satu kajian mengenai analisis peran Tiongkok ialah Sudan Selatan sebagai tempat uji coba untuk diplomasi proaktif.<sup>9</sup> Bahkan telah diperdebatkan bahwa peran Tiongkok di Sudan Selatan saat ini akan menjadi gambaran bagaimana hubungan Tiongkok di masa depan dengan negara-negara di kawasan Afrika Sub Sahara. Hal ini terlihat dalam pendapat beberapa ahli bahwa Tiongkok menggunakan pendekatan yang lebih tegas untuk melindungi kepentingannya di Sudan Selatan akan menjadi citra baru Tiongkok di sistem internasional.

Dalam menegaskan kepentingan Tiongkok di Sudan Selatan, Tiongkok telah mengerahkan lebih dari 2000 pasukan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB, dan melakukan banyak upaya diplomatik lainnya untuk membantu

---

<sup>8</sup> International Crisis Group, "China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

<sup>9</sup> Obert Hodz, "Strategy of 'Parallels': China in the South Sudanese armed conflict", Asia Center-note observatoire china 2016/2017, 40-46.

menyelesaikan perang sipil yang sedang berlangsung.<sup>10</sup> Peran Tiongkok di konflik sipil Sudan Selatan adalah sebagai *Third Party Intervener* dalam mengupayakan perdamaian. Intervensi pihak ketiga merupakan strategi resolusi konflik yang melibatkan pihak ketiga. Keikutsertaan pihak ketiga ini juga dapat dilihat dari *power* negara tersebut dan kondisi konflik. Sehingga terdapat tingkatan keterlibatan sebuah negara dalam menyelesaikan konflik. Metode intervensi *Third-party intervention* ini juga mengalami perkembangan dalam kajiannya. *Third-party intervention* tidak hanya berbentuk mediasi, namun juga terdapat bentuk-bentuk lainnya seperti konsiliasi, arbitrase, *peacekeeping operation*, konsultasi dan lainnya<sup>11</sup>.

Keterlibatan Tiongkok di konflik sipil ini bermula pertemuan Ma Qiang sebagai duta besar Tiongkok untuk Sudan Selatan dengan Presiden Salva Kiir membahas informasi resmi dan kondisi pasca pecahnya konflik sipil di Sudan Selatan. Beberapa hari kemudian pada tanggal 24 Desember 2013, Duta Besar Ma Qiang melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Mr. Benjamin, bertukar pandangan tentang situasi Sudan Selatan dan mencoba mempromosikan perdamaian disana. Ma Qiang menanggapi konflik sipil tersebut telah mengancam perusahaan Tiongkok terutama para insinyur dan teknik Tiongkok di daerah konflik.<sup>12</sup> Ma Qiang meminta adanya tindakan dari pemerintah Sudan Selatan yang konkrit untuk mengatasi permasalahan ini, terutama kemauan pemerintah Sudan Selatan untuk melakukan perundingan

---

<sup>10</sup> Obert Hodz, 40-46.

<sup>11</sup> Junhyuk Park, 183-190.

<sup>12</sup> Aly Verjee, "Explaining China's involvement in the South Sudan peace process" lowy institute; <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process> (diakses pada tanggal 12 desember 2018).

dengan pihak pemberontak untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai konflik sipil yang terjadi.<sup>13</sup>

Dalam mengupayakan perundingan terhadap pihak yang berkonflik Tiongkok segera mengangkat utusan atau perwakilan khusus yang memiliki kredibilitas dan pengetahuan yang luas terhadap permasalahan yang menimpa Sudan Selatan dan negara-negara sekitarnya. Tiongkok mengangkat Zhong Jianhua sebagai perwakilan diplomatik khusus untuk permasalahan di Sudan Selatan. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying mengatakan bahwa utusan khusus Zhong Jianhua mengunjungi Selatan Sudan dan negara-negara tetangga, dan secara aktif membawa upaya mediasi.<sup>14</sup> Tiongkok bersedia untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak-pihak terkait dan bersama-sama mendorong pemulihan stabilitas di Sudan Selatan. Adapun hasil dari negosiasi, yang pertama perjanjian gencatan senjata pada tahun 2014.

Penyelesaian konflik yang dilakukan Tiongkok melalui *Third Party Intervention* merupakan hal menarik untuk dikaji. Tiongkok memiliki prinsip luar negeri *non-interference* yang berlawanan dengan tindakan mediasi yang diusung oleh Tiongkok pada konflik sipil di Sudan Selatan. prinsip *non-interference* ini menjadikan Tiongkok untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain begitupun sebaliknya. Prinsip ini bahkan juga menjadi prinsip yang telah disepakati dalam kerjasama dengan organisasi regional di kawasan Afrika. Konflik sipil di Sudan Selatan telah mengarahkan Tiongkok untuk

---

<sup>13</sup> Aly Verjee, "Explaining China's involvement in the South Sudan peace process" lowy institute; <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/explaining-chinas-involvement-south-sudan-peace-process> (diakses pada tanggal 12 desember 2018).

<sup>14</sup> Obert Hodz, 46

menginterpretasi lebih fleksibel tentang kebijakan non-intervensi melihat peluang pendekatan baru untuk melindungi kepentingannya. Hal yang menarik lainnya adalah perwakilan diplomatik Tiongkok belum pernah mendapatkan pengalaman dalam menyelesaikan konflik dalam bentuk mediasi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Harry Verhoeven bahwa “*Chinese diplomats took unprecedented steps in publicly pressuring belligerents Salva Kiir and his former vice president, Riek Machar, to sign a ceasefire agreement*”.<sup>15</sup> Sebagai pemain baru dalam menggunakan strategi *Third Party Intervention*, Tiongkok masih mengalami beberapa hal yang harus diperbaiki dalam menangani permasalahan konflik sipil. Hal ini tentunya menjadi aspek yang menarik untuk menjadi kajian dalam melihat upaya Tiongkok melakukan mediasi di konflik sipil Sudan Selatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Konflik sipil di Sudan Selatan telah membuat dampak yang signifikan terhadap negara Tiongkok. Adanya konflik sipil ini telah membuat kepentingan Tiongkok terhambat di Sudan Selatan. Tiongkok memiliki investasi yang besar di Sudan Selatan di mana mencapai keuntungan marginal sekitar 50% sebelum adanya konflik sipil. Investasi ini bersumber dari minyak dan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ada di Sudan Selatan. Konflik sipil Sudan Selatan telah membuat aktivitas perusahaan Tiongkok terhenti sehingga Tiongkok mengalami kerugian dari hal tersebut. Sebagai respon terhadap kondisi di Sudan Selatan, Tiongkok melakukan Tindakan intervensi sebagai upaya penyelesaian konflik sipil di Sudan Selatan. Menariknya tindakan Tiongkok ini merupakan bentuk inkonsistensi Tiongkok terhadap prinsip *non-interference* yang selama ini

---

<sup>15</sup> Obert Hodz,49

merupakan prinsip kebijakan luar negeri Tiongkok. Selain itu bentuk intervensi yang dilakukan Tiongkok juga berbeda dengan tindakan intervensi yang pernah dilakukan Tiongkok sebelumnya. Tiongkok melakukan intervensi di konflik sipil Sudan Selatan dengan metode diplomatik yaitu dengan menggunakan beberapa metode penyelesaian konflik seperti mediasi, negosiasi dan konsultasi. Walaupun demikian Tiongkok belum memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan tindakan intervensi yang bersifat diplomatik ini seperti yang dikatakan oleh Zhong Jianhua.<sup>16</sup> Sehingga menarik untuk diteliti upaya Tiongkok dalam menyelesaikan konflik sipil di Sudan Selatan.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu, *“Bagaimana upaya Tiongkok dalam melakukan intervensi di Sudan Selatan?”*

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Menjelaskan upaya intervensi yang dilakukan Tiongkok dalam kasus Sudan Selatan.
- Menjelaskan tentang konflik Sudan Selatan dan kepentingan Tiongkok di Sudan Selatan.

---

<sup>16</sup> International Crisis Group, "China's Foreign Policy Experiment in South Sudan," International Crisis Group, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> (Diakses pada 14 January 2018)

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi akademisi dan masyarakat internasional terhadap isu intervensi yang dilakukan oleh sebuah negara.
- Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), ataupun organisasi internasional non pemerintah untuk sebagai gambaran penyelesaian konflik dengan metode mediasi melalui *Third party Interventions*.

## 1.6 Studi Pustaka

Dalam studi pustaka ini, penulis akan memaparkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memberikan signifikansi pada topik penelitian yang diambil. Secara umum penulis membagi studi pustaka berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai prinsip intervensi Tiongkok dan konsistensinya di Afrika dan bentuk intervensi halus Tiongkok di Sudan Selatan.

Studi pustaka pertama yang penulis gunakan sebagai bahan acuan adalah hasil tesis Qinye Gou yang berjudul *"The Principle of Non-Interference and China's Role in International Conflict in the New Era"*. Di dalam buku ini Qinyeng menjelaskan bagaimana upaya Tiongkok menyelesaikan isu-isu *high politics* dengan damai di Asia, Afrika, dan Timur Tengah.<sup>17</sup> Salah satu tantangan yang dihadapi Tiongkok menuju keunggulan global adalah bagaimana menyeimbangkan tanggung jawab internasional yang semakin meningkat dan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan dan ditegakkan selama

---

<sup>17</sup> Gou Qing Ye, 35



beberapa dekade. Di dalam Tesis ini, Qingye mencoba menjawab mengapa Tiongkok tetap berpegang pada prinsip non-interferensi, bagaimana Tiongkok menangani kontradiksi antara tanggung jawab internasional dan prinsip non-interferensi Tiongkok. Qingye mengadopsi strategi metodologis gabungan, termasuk analisis mendalam pada permasalahan dan studi kasus. Selanjutnya Qingye menggunakan teori mediator dan perubahan kebijakan luar negeri namun lebih merujuk pada kognitif teori dan prospek teori hal inilah yang membedakan penelitian Qingye dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Studi pustaka selanjutnya adalah karya Lauren Ploch Blanchard dalam tulisanya *Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead*.<sup>18</sup> Lauren menuliskan konflik Sipil Sudan Selatan merupakan sebuah arena perebutan kepentingan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan di Sudan selatan. Peran pihak-pihak dalam menyelesaikan konflik sipil di Sudan Selatan seperti Amerika Serikat secara efektif memfasilitasi penyelesaian konflik sipil yang berujung pada konflik bersenjata. Amerika Serikat juga berkontribusi dalam pemberian bantuan luar negeri untuk memfasilitasi pemerintah Sudan Selatan membangun sarana fasilitas gawat darurat. Selanjutnya peran PBB juga berpengaruh di sini dalam menjaga perdamaian dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian di Sudan Selatan. Tulisan Lauren akan berkontribusi pada penggambaran kondisi konflik di Sudan Selatan serta dinamika perebutan kepentingan dari berbagai pihak.

Studi pustaka yang ketiga adalah tulisan Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih dalam bukunya *Harmonious Interventions: China's Quest for Relational*

---

<sup>18</sup>, Lauren Ploch Blanchard, 1

*Security*<sup>19</sup>. Dalam tulisan tersebut dideskripsikan keadaan Tiongkok yang mengalami peningkatan kemajuan perekonomian menjadikan Tiongkok memiliki pengaruh yang besar pada sistem internasional yang anarki hal ini merujuk pada bagaimana Tiongkok menerapkan prinsip non intervensinya yang dipengaruhi kondisi domestik Tiongkok.<sup>20</sup> Selanjutnya keadaan sistem internasional juga mendorong Tiongkok untuk beberapa kasus tidak konsisten bahkan sangat tidak menerapkan prinsip luar negeri Tiongkok. Pada tulisan ini tulisan Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih menggunakan pendekatan *Balancing of Relations* untuk menganalisis perilaku Tiongkok. Tulisan yang menjadi bahan acuan awal untuk mendeskripsikan prinsip non intervensi Tiongkok dalam pengimplementasinya.

Studi pustaka keempat adalah tulisan Fisher, R. J., dan Keashly, L yang berjudul *The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third party Interventions*.<sup>21</sup> Pustaka ini menjelaskan bahwa *Third party Interventions* adalah salah satu yang paling sering digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan konflik. Biasanya pendekatan ini digunakan pada konflik konflik yang cenderung tidak dapat diselesaikan tanpa menggunakan jalur kekerasan. *Third party Interventions* secara umum dapat didefinisikan sebagai keterlibatan negara/ organisasi atau lembaga ke dalam konflik berkelanjutan yang merupakan menyelesaikan konflik.<sup>22</sup> Fungsi intervensi *Third party* membantu pihak yang berkonflik menganalisis konsekuensi dari tindakan mereka, dan mengelola penyelesaian konflik dengan cara yang saling

---

<sup>19</sup> Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih , *Harmonious Interventions s: China's Quest for Relationl Security* (London: Routledge, 2014), 1-9

<sup>20</sup> Ching-chiu hang dan Chin-yu Shih, 35

<sup>21</sup> Fisher Ronald J. and Loreleigh Keashly . "The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of Third party Interventions ", in: *Journal of Peace Research*, 28, 1: 29-42

<sup>22</sup> Fisher, 29-42,

menguntungkan. Tulisan dari Fisher, R. J., dan Keashly, L yang menjadi acuan dalam melihat bagaimana Tiongkok menjalankan strategi intervensinya melalui metode *Third party Interventions*. Studi pustaka ini membantu penulis menganalisis permasalahan dengan menggunakan model *Third party Interventions* yang diawali dengan mengidentifikasi bentuk- bentuk intervensi kemudian mendeskripsikan tahap-tahap dalam *Third party Interventions* dan kemudian menggolongkan tingkat keterlibatan negara dalam tahapan intervensi.

Studi pustaka kelima adalah tulisan Barry M. Goldman, Russell Cropanzano, Jordan Stein, dan Lehman Benson yang berjudul *The Role of Third Parties/ Mediation in Managing Conflict in Organization*.<sup>23</sup> Studi pustaka ini menjelaskan bahwa peran dalam manajemen konflik tanpa kekerasan adalah diarahkan membantu para aktor dalam konflik untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri ketika berbagai masalah mengancam untuk mengganggu atau menurunkan hubungan tawar-menawar (*Face-Saving*). Dalam proses pengurangan konflik oleh dapat berdampak positif dan langsung kontribusi dengan memfokuskan para pihak pada perjanjian pengakhiran perang, memberikan agenda negosiasi memanipulasi waktu proses negosiasi. Pihak ketiga juga dapat membantu mengatasi kendala dihadapi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Studi pustaka ini menjadi gambaran dan referensi penulis dalam melihat peran *Third Party Intervention* pada konflik sipil.

---

<sup>23</sup>Barry M. Goldman, et all., *The psychology of conflict and conflict management in organizations* [SIOF Frontiers Series], Chapter: *The role of third-parties/mediation in resolving conflict in organizations*, (London:Lawrence Erlbaum, 2008),297.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 *Third party Interventions*

Resolusi konflik merupakan semua upaya dalam menggabungkan elemen sosial, ekonomi dan politik melalui instrumen mediasi, negosiasi, *peace building* dan rekonsiliasi. Di antara semua instrumen resolusi konflik, *Third party Interventions* adalah salah satu yang paling sering digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan konflik. Biasanya pendekatan ini digunakan pada konflik konflik yang cenderung tidak dapat diselesaikan tanpa menggunakan jalur kekerasan. *Third party Interventions* secara umum dapat didefinisikan sebagai keterlibatan negara, organisasi atau lembaga ke dalam konflik berkelanjutan yang berupa menyelesaikan konflik.<sup>24</sup> Menurut Jean Christophe Boucher, intervensi pihak ketiga membantu pihak yang berkonflik menganalisis konsekuensi dari tindakan mereka, dan mengelola penyelesaian konflik dengan cara yang saling menguntungkan. Menurut Ronald J. Fisher Terdapat 6 pembagian bentuk dari *Third party Interventions* yaitu sebagai berikut<sup>25</sup>,

1. *Conciliation*, di mana pihak ketiga menyediakan sarana komunikatif informal antara pihak yang sedang berkonflik yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, menurunkan ketegangan dan mendorong interaksi langsung, biasanya bentuk intervensi pihak ketiga ini dalam bentuk negosiasi.
2. *Consultation*, di mana pihak ketiga bekerja untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara konsultatif dengan menggunakan instrumen

<sup>24</sup> Ronald J. Fisher dan Loreleigh Keashly, "The Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of *Third party Interventions* ", *Journal of Peace Research* 28,1, 29-42.

<sup>25</sup> Ronald J. dan Keashly, 169-167

komunikasi baik antar kedua pihak yang berkonflik dan menganalisis permasalahan antara kedua pihak yang berkonflik .

3. *Pure Mediation*, di mana pihak ketiga bekerja untuk memfasilitasi penyelesaian yang menggunakan instrumen negosiasi. Pemecahan permasalahan substantif melalui penggunaan penalaran, persuasi, kontrol informasi yang efektif dan saran alternatif
4. *Power Mediation*, pihak ketiga memiliki peran sebagai mediator namun menggunakan cara-cara paksaan dan ancaman hukuman untuk mengarahkan kedua belah pihak mencapai pemecahan permasalahan. *Third party* juga berperan sebagai sebagai monitor dan penjamin kesepakatan.
5. *Arbitration*, di mana pihak ketiga membuat kesepakatan yang mengikat kedua pihak yang berkonflik untuk di bawah pada peradilan sehingga kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan secara adil.
6. *Peacekeeping*, dimana pihak ketiga menyediakan personel militer untuk memantau gencatan senjata, menjaga hak-hak kemanusiaan tetap terjaga dan membantu manajemen proses pengambilan keputusan politik seperti pemilihan.

*Third Party Intervention* sebagai metode penyelesaian konflik yang masih dalam perkembangan pada menyelesaikan konflik. Berbeda dengan metode penyelesaian konflik lainnya *Third Party Intervention* memiliki keunggulan tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang cenderung bersenjata dan menggunakan kekerasan.<sup>26</sup> *Third Party Intervention* banyak dipakai dalam

---

<sup>26</sup> Ronald J. Fisher, 165-170

menyelesaikan konflik yang bersifat *ethnopolitical* konflik atau konflik *intrastate* yang memiliki keterikatan dengan adanya pengaruh etnis yang di permasalahkan.<sup>27</sup> Metode *Third Party Intervention* dapat membawa kedua belah pihak yang berseteru untuk melakukan perundingan dan tawar-menawar sebagai bentuk upaya proses perdamaian. Beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa metode ini dapat memperpendek durasi konflik sipil yang terjadi tentunya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi seperti keterlibatan aktor eksternal, tekanan dari komunitas internasional, latar belakang permasalahan dan lainnya sebagainya.

*Third party intervention* juga memiliki *model contingency* yang menghubungkan jenis-jenis intervensi ke tahap-tahap eskalasi konflik.<sup>28</sup> Menurut Fisher Hal ini didasari bahwa konflik adalah perpaduan unsur-unsur obyektif dan subyektif sehingga dibutuhkan penanganan yang mencakupi kedua unsur tersebut. Jenis-jenis intervensi yang telah dijelaskan di atas memiliki perbedaanya dalam unsur-unsur yang membangunnya sehingga di butuhkan metode yang dapat dicocokkan dengan tingkatan atau tahap eskalasi konflik.

*Model contingency* bertujuan untuk mengidentifikasi empat tahap dalam eskalasi konflik pada *third party intervention* yakni *discussion*, *polarisation*, *segregation*, *destruction*.<sup>29</sup> Tahapan eskalasi tersebut dipengaruhi oleh sifat komunikasi dan interaksi antara para pihak, persepsi pihak-pihak terhadap pihak lain dan hubungan keberpihakan. *Intervener* nantinya akan melihat kondisi konflik berdasarkan kondisi konflik, nantinya intervensi akan mengidentifikasi

---

<sup>27</sup> Ronald J. Fisher, 167-170

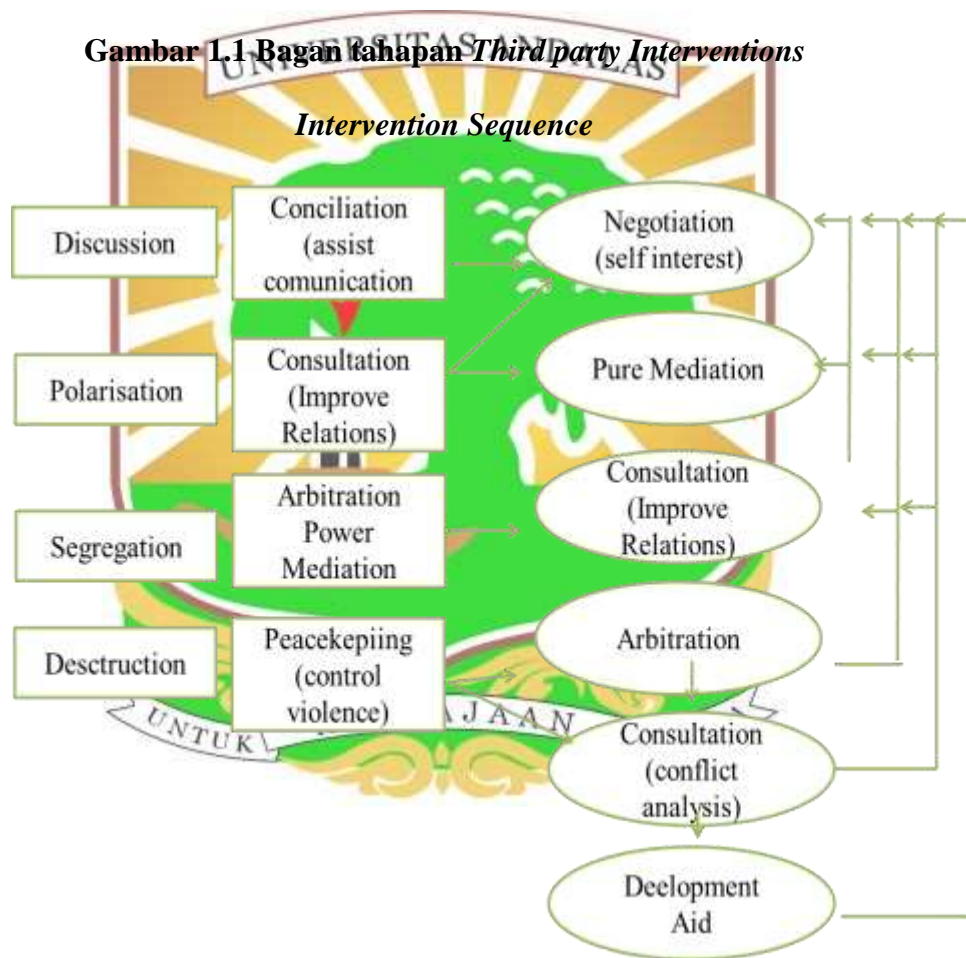
<sup>28</sup> Ronald J. Fisher, 311

<sup>29</sup> Ronald J. Fisher , 315-136

tahapan atau tingkatan mana yang akan diambil dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut.

Berbeda dengan model eskalasi konflik lainnya *Model Contingency* lebih berfokus pada tingkat politik pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap resolusi konflik yang diambil. Hampson dan Aii dalam tulisannya menyebutkan *Model contingency* berguna dalam mereka menghubungkan berbagai kombinasi berbagai jenis bantuan pihak ketiga dengan tingkat kekerasan.<sup>30</sup>

**Gambar 1.1** Bagan tahapan *Third party Interventions*



Sumber: Ronald J Fisher dan Loreleigh Keashly, 1991.

<sup>30</sup> Fisher, 29-42

Bagan di atas mendeskripsikan tahapan-tahapan *Third party Interventions* berupa<sup>31</sup>:

1. *Discussion*, pada tahap ini kedua belah pihak yang berkonflik sulit untuk melakukan perundingan sehingga sangat dibutuhkan peran *Third party* dalam mengkonsolidasi kedua belah pihak. Bentuk intervensi pada tahapan adalah konsiliasi dimana jenis intervensi ini dapat menangani secara efektif masalah-masalah kecil persepsi dan emosional, dan mengarahkan para pihak ke dalam negosiasi untuk mengelola perbedaan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk bernegosiasi sehingga dapat menyelesaikan perbedaan pandangan kedua belah pihak;
2. *Polarisation*, tahap ini ditandai dengan adanya persepsi negatif dan rasa permusuhan. Dalam mengupayakan perdamaian sangat dibutuhkan peran pihak ketiga sebagai sarana untuk berkonsultasi. Konsultasi yang baik dari *Third party* dapat membantu menjernihkan mispersepsi dan kesalahpahaman serta meredakan tensi kedua negara. Setelah itu, pihak yang berkonflik kemudian dapat didorong untuk masuk ke mediasi murni untuk mencapai kesepakatan;
3. *Segregation*, Tahap ini menjelaskan kondisi konflik dengan rasa permusuhan yang tinggi antara kedua belah pihak. Dalam tahap ini, intensitas komunikasi menjadi terbatas dan terkadang ada kecenderungan penggunaan ancaman. Kondisi tersebut mendorong pihak ketiga untuk melakukan bentuk intervensi berupa arbitrase atau

---

<sup>31</sup> Fisher, 29-42



*power mediation*. Tindakan ini diperlukan untuk mengendalikan permusuhan pihak-pihak dan mengurangi efek negatif yang ada pada hubungan kedua negara;

4. *Destruction*, pada tahap ini pihak-pihak yang berkonflik sudah berada pada titik terendah dalam hubungan mereka dan menganggap situasi konflik tidak dapat diselesaikan dan akan berlangsung secara terus menerus. Penggunaan kekerasan sangat dominan pada tahapan ini. Kedua belah pihak tidak ragu saling menyerang satu sama lain dan bahkan dapat berakhir pada titik terberatnya yaitu adanya genosida. Tahap ini memaksa pihak ketiga untuk melakukan intervensi dalam bentuk *peacekeeping* untuk mengendalikan kekerasan, dan mengusahakan usaha mediasi dan konsultasi kembali. Intervensi berupa bantuan pembangunan juga ada pada tahap ini. Bantuan pembangunan berperan dalam menangani ketidakadilan struktural dan mengatasi masalah kesetaraan dan keadilan distributif. Selain itu bantuan pembangunan juga berdampak pada pencegahan terhadap terjadinya kekerasan yang disebabkan kurangnya kebutuhan dasar sehingga dapat mewujudkan perdamaian positif.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *model contingency* ini menjadi acuan dalam melihat bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan kondisi konflik yang cocok untuk menggunakannya. Berbagai bentuk intervensi menemukan legitimasi dalam berbagai jenis kekuatan, dan perlu dievaluasi baik dari segi efektivitas dan penerimaan terhadap tindakan tersebut. Sebagai contoh pada konsultasi, konsultasi, dan mediasi murni cenderung

mengerahkan tingkat kontrol yang lebih rendah atas proses dan hasil, dan juga lebih mengandalkan kekuatan Arbitrase, mediasi kekuasaan, dan *peacekeeping* dicirikan oleh tingkat kontrol yang lebih tinggi atas proses dan hasil.

Pihak ketiga dapat saja berada pada tingkatan *Polarisation* hal ini sesuai dengan kondisi konflik yang sedang berlangsung. Tindakan pihak ketiga jika berada pada stage ini dapat berbentuk mediasi. Setelah terjadi mediasi antara kedua belah pihak yang berseteru maka *intervener* akan menganalisis apakah praktik mediasi tersebut telah berhasil hal ini dilihat dari intensitas berkomunikasi, persepsi antar kedua belah pihak dan bentuk kepatuhan terhadap isi kesepakatan dari adanya mediasi. Jika kondisi setelah adanya mediasi ini semakin membaik maka *intervener* akan membawa kedua belah pihak ketahapan eskalasi konflik lebih mengarah ke meningkatkan hubungan baik dengan adanya diskusi. Seperti yang di tunjukkan oleh gambar 1.1 bahwa eskalasi konflik kemudian menuju kearah atas atau menunjuk pada arah panah atas yang menunjukkan keberhasilan *intervener* dalam mengatasi permasalahan kedua belah pihak yang berkonflik. Namun jika ternyata mediasi yang dilakukan tidak membawa perdamaian positif dan membuat kondisi konflik semakin memanas maka tingkatan *polarization* akan menjadi tingkatan *segregation*.



## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau

kemanusiaan.<sup>32</sup> Dalam prosesnya, penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang telah didapatkan.<sup>33</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, penulis mencoba menggambarkan bagaimana upaya Tiongkok melakukan intervensi di konflik sipil Sudan Selatan. Penggunaan metode penulisan deskriptif ditujukan agar dapat menggambarkan dan menyampaikan masalah yang diteliti secara cermat dan lengkap.

### **1.8.2. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian bertujuan agar isi penelitian lebih fokus pada hal yang akan dideskripsikan. Penelitian ini dibatasi dari periode tahun 2013 sampai 2018. Tahun 2013 adalah awal berkembangnya konflik Sudan Selatan. Sementara itu, tahun 2018 adalah masa terdapatnya kesepakatan gencatan senjata berhasil didapat dari mediasi Tiongkok.

### **1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis atau dapat disebut sebagai variabel dependen; merupakan objek yang akan dideskripsikan dalam sebuah penelitian.<sup>34</sup> Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen, merupakan unit yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis.<sup>35</sup> Tingkat atau level analisis adalah unit (individu, negara atau sistem) yang menjadi fokus dari sebuah teori.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> John W. Creswell. *Research Design: "Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition"*, (California, SAGE Publications : 2013), 4.

<sup>33</sup> John W. Creswell, 4-5.

<sup>34</sup> Laura Roselle dan Sharon Spray, "Research and Writing in International Relations", (London: Longman Pearson, 2008), 11-12.

<sup>35</sup> Laura Roselle dan Sharon Spray, 11-12.

<sup>36</sup> Paul D'Anieri, *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs*, 2nd ed. (Boston: Wadsworth, 2012), 19.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konflik sipil Sudan Selatan. Sedangkan unit eksplanasi adalah upaya Tiongkok dalam melakukan intervensi *Third party*. Sementara itu, tingkat analisis akan berada di level negara.

#### **1.8.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari *primary data* dan *secondary data*. *primary data* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Penulis akan menggunakan data primer berupa hasil observasi terhadap upaya mediasi Tiongkok melalui situs resmi kementerian luar negeri Tiongkok [www.fmprc.gov.cn](http://www.fmprc.gov.cn), Situs resmi pemerintah Tiongkok dan Sudan Selatan, situs-situs media massa nasional Tiongkok dan Sudan Selatan. Sedangkan *Secondary Data* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Penulis juga akan menggunakan referensi dari penelitian-penelitian, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel, dan juga situs-situs yang membahas tentang objek penelitian. Mengingat keanekaragaman sumber informasi yang dapat diperoleh, maka dalam penulisan ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penulisan. Data-data diolah untuk menghasilkan serangkaian jawaban atas permasalahan penelitian.

#### **1.8.5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.<sup>37</sup> Adapun teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Matthew B. Miles dan Micheal Huberman, *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 2015), 30-45

1. Reduksi Data, terdiri dari proses organisasi data dan kategorisasi data dengan konsep dimana data akan disusun secara sistematis;
2. Penyajian Data, proses menghubungkan data dengan kerangka konseptual yang digunakan;
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, terdiri dari proses evaluasi dan melaporkan hasil temuan.

Dalam konteks penelitian ini, maka setelah proses pengumpulan data langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penelitian adalah:

- a. Reduksi data, tahapan ini penulis akan mereduksi data dengan menggunakan kata kunci “intervensi, mediasi, Tiongkok dan konflik sipil di Sudan Selatan”;
- b. Penyajian data, data disajikan dengan menggunakan konsep *Third party Interventions* yang memuat jenis-jenis intervensi, tahap-tahap dan *Control Strategy*;
- c. Kesimpulan dan verifikasi, dari konsep *Third party Interventions*, akan ditarik kesimpulan bagaimana bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh Tiongkok. Setelah itu, akan dilakukan peninjauan kembali apakah konsep tersebut mampu menjawab pertanyaan penelitian.

## 1.9. Sistematika Penulisan

### Bab I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan

sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan tentang permasalahan penelitian yang diteliti.

## Bab II: Konflik Sudan Selatan.

Dalam Bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai konflik sipil yang terjadi di Sudan Selatan dengan lebih memfokuskan faktor penyebab terjadinya konflik sipil di Sudan Selatan, dampak terjadinya perang dan bagaimana dinamika konflik sipil, dimulai dari awal konflik tersebut mulai pecah hingga adanya kesepakatan damai antara pihak pemerintah dan pihak pemberontak yang dipelopori oleh Tiongkok. .

## Bab III: Hubungan Tiongkok Di Sudan Selatan

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan hubungan Tiongkok dan Sudan Selatan. Dimulai dari kepentingan Tiongkok di Sudan Selatan yang meliputi kepentingan ekonomi, politik dan militer. Tiongkok juga memiliki beberapa bidang kerjasama dengan Sudan Selatan seperti bidang *political exchange*, *economic and trade cooperation* dan *education and cultural exchange*.

## Bab IV: Upaya Intervensi Tiongkok Di Sudan Selatan

Bab ini menjelaskan bagaimana upaya Tiongkok melakukan Third Party Intervention di Sudan Selatan dengan *model contingency* yang terbagi menjadi empat tahapan intervensi yang menghubungkan kondisi konflik dengan tipe intervensi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Tahapan tersebut meliputi yaitu *Discussion*, *Polarisation Segregation*, *Destruction*.

## Bab V: Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan penelitian terkait dengan keterlibatan Tiongkok pada konflik sipil di Sudan Selatan.

